



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR-RI dengan Menteri Perindustrian RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	20 (dua puluh)
Hari/Tanggal	:	Rabu, 12 Juli 2017
W a k t u	:	Pukul 10.45 s.d 13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN) didampingi oleh: 1. Bowo Sidik Pangarso ((Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG) 2. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Gerindra) 3. H. Inas Nasrullah Zubir, BE., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Hanura).
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	1. Membahas RKA K/L dan RKP Tahun 2018. 2. Membahas RKA K/L dalam RUU APBNP TA 2017. 3. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016.
Hadir	:	26 dari 50 Anggota Komisi VI DPR RI.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI dibuka pada pukul 10.45 WIB, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja hari ini Rabu, 12 Juli 2017 dalam rangka:
 - 1) Membahas RKA K/L dan RKP Tahun 2018.
 - 2) Membahas RKA K/L dalam RUU APBNP TA 2017.
 - 3) Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri Perindustrian RI untuk menjelaskan RKA K/L dan RKP Tahun 2018, RKA K/L dalam RUU APBNP TA 2017 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016 Kementerian Perindustrian RI.

4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas RKA K/L dan RKP Tahun 2018, RKA K/L dalam RUU APBN TA 2017, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016 Kementerian Perindustrian RI.

II. KESIMPULAN

A. PERUBAHAN APBN TAHUN ANGGARAN 2017

1. Komisi VI DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Perindustrian RI Tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp708.518.143.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*) atau 24,92% dari total anggaran sebesar Rp2.843.259.571.000,00 (*Dua Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*), termasuk pemanfaatan saldo awal BLU sebesar Rp14.830.627.000,00 (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dan hibah sebesar Rp541.945.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui efisiensi Belanja Barang Kementerian Perindustrian RI dalam perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 sebesar Rp227.057.793.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI menyetujui usul perubahan realokasi anggaran antar program Kementerian Perindustrian RI berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian tanggal 20 Maret 2017 dari sebesar Rp219.100.000.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Seratus Juta Rupiah*) menjadi Rp52.000.000.000,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Rupiah*) untuk membiayai pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri, dan Penyusunan strategi implementasi *Industry 4.0*, sedangkan Rp167.100.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Seratus Juta Rupiah*) menjadi salah satu sumber penghematan anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2017. Selanjutnya Komisi VI DPR RI mengamanatkan kepada Anggota Badan Anggaran Komisi VI DPR RI untuk menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
4. Komisi VI DPR RI mendukung kebijakan Kementerian Perindustrian RI dalam melindungi industri kecil/menengah dari ancaman globalisasi internasional melalui 16 kegiatan yang telah dan akan dilakukan.

B. RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) K/L DAN RKP TAHUN 2018

5. Komisi VI DPR RI belum menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Perindustrian RI Tahun 2018 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan Nomor S-398/MK.02/2017 dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas Nomor B-193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 sebesar Rp2.827.854.207.000,00 (*Dua Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah*) yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp2.605.734.786.000,00 (*Dua Triliun Enam Ratus Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*) dan PNB/BLU sebesar Rp222.119.421.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*). Selanjutnya Komisi VI DPR RI mengamanatkan kepada

Anggota Badan Anggaran Komisi VI DPR RI untuk menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

6. Komisi VI DPR RI mendukung Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Perindustrian RI Tahun 2018 yang mendukung Program Prioritas Nasional di bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan pangan, serta penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan peningkatan daya saing industri.

C. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016

7. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Perindustrian RI pada Tahun Anggaran 2016 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 9 (sembilan) kali berturut-turut sejak tahun 2008 dan mendapatkan predikat terbaik dari Menteri Keuangan RI.

D. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB.